



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata & Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kie, Than Thong, 2000. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Buku II*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kohar, A, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.
- Lubis, Suhwardi K, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta..
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation Studies of Business Law (CDBSL), Yogyakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo R., 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Pitlo, A, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M. Isa Arief, S.H)*, Cetakan Kedua, PT Intermedia, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, R, 1989, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____ 1996, *Kamus Hukum*, Cet. XXI, Pradnya Paramita. Jakarta.
- _____ dan R. Tjitrosudibjo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Pramita, Jakarta.



Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1986, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta..

Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

B. Artikel/Tesis

Basyit, Abdul, “Undang-Undang Jabatan Notaris Pembaharuan Bidang Kenotariatan”, *Media Notariat*, Edisi September-Oktober 2004.

Beda, Margareth Sri Febriani, “Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Notaris”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

Fitrianingsih, Elva, “Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Apabila Terjadi Sengketa Perdata”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Imron, H.M, "Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi", *Renvoi*, Nomor 10/34 Maret 2006.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Lembaran Negara Tahun 1924, Nomor 556.

Reglement op het Notaris Ambtenaar in Netherlands Indie, Stb. 1860 No. 3 (Peraturan Jabatan Notaris)

Het Herziene Indonesisch Reglement, Stb. 1941 Nomor 44 (HIR).

Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie, Stb. 1847 No. 23 jo. Stb. 1848 No. 47 (RO)

Stb. 1916 Nomor 46 jo Nomor 43 tentang *Waarmerken van Onderhansche Acten enz.*



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pasal 147 Ayat 3
Rechtsreglement Buitengewesten tanggal 30 April 1964.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
3.

D. Wawancara

Danardono, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh
Notaris Dalam Sengketa Perdata”, *Wawancara*, Pengadilan Sleman.

Hitaprana, 2015, Legalisasi Akta Di Bawah Tangan, *Wawancara*, Sleman.

Nurhadi Darussalam, 2015, Legalisasi Akta Di Bawah Tangan, *Wawancara*, Sleman.